

## Faktor yang Memengaruhi Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah BUMD di Indonesia

Nurfadhila Tsania<sup>1</sup>, Destian Arshad Darulmalshah Tamara<sup>2</sup>, Setiawan<sup>3</sup>  
nurfadhila.tsania@polban.ac.id

<sup>1,2</sup>Program Studi D4 Keuangan Syariah, Politeknik Negeri Bandung

<sup>3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro

---

### KEYWORD

NPF, CAR, FDR,  
BOPO, GRDP, Sharia  
Bank of Municipally-  
Owned Corporations.

### ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the influence of Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), Operational Expenses on Operational Financing (BOPO) and Gross Regional Domestic Product (GRDP) partially on Non-Performing Financing (NPF) in Sharia Bank of Municipally-Owned Corporations in Indonesia. The data analysis technique used is path analysis. This study selected a sample with a purposive sampling method and selected three Islamic Commercial Banks to be used. The data used is secondary data sourced from the financial reports of Islamic Commercial Banks and the Central Statistics Agency which have been published and collected using documentation techniques or direct quotations. The results of this study indicate that CAR, FDR, and GRDP have no effect on NPF meanwhile BOPO has an effect on NPF.

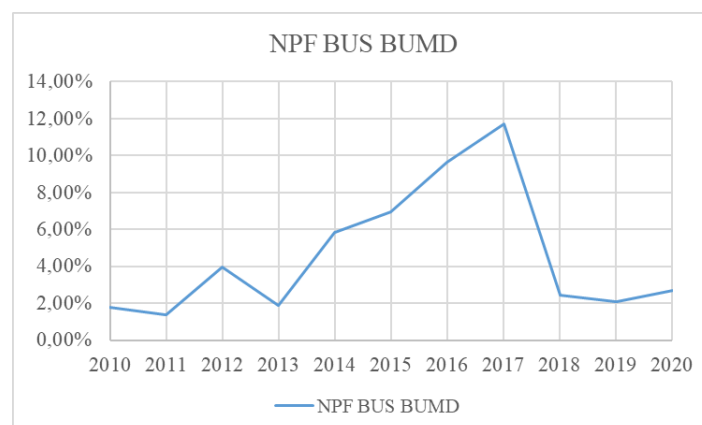
---

## 1. Pendahuluan

Selama beberapa tahun terakhir perkembangan perbankan di Indonesia mengalami perlambatan yang dapat dilihat dari aspek penghimpunan dan penyaluran dana yang tercermin dari pertumbuhan Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD), pertumbuhan aset dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK). Dimana dapat diketahui bahwa pertumbuhan Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) terus menerus turun dari tahun 2016 hingga 2020, kemudian pertumbuhan aset dan pertumbuhan DPK yang juga rata-rata mengalami penurunan. Dengan pertumbuhan pembiayaan yang hanya mencapai 8,08% pada tahun 2020.

Pembiayaan sangat berpotensi mengalami kegagalan. Risiko pembiayaan terjadi akibat nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Yang mana hal tersebut sejalan dengan pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 yang mengatakan bahwasanya risiko kredit adalah suatu hal yang terjadi karena pihak nasabah ataupun pihak lain mengalami kegagalan dalam membayar kewajiban terhadap bank sebagaimana telah tercantum dalam perjanjian yang telah disepakati. Pembiayaan bermasalah tercermin dalam Non Performing Financing (NPF) yang merupakan suatu parameter yang memperlihatkan pembiayaan yang berisiko di perbankan syariah.

Maka dari itu penulis mencari data mengenai NPF Bank Umum Syariah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia. Berikut kondisi NPF BUS BUMD di Indonesia:



Gambar 1. Pertumbuhan NPF BUS BUMD 2010-2020

Sumber: Laporan Keuangan Bank BJB Syariah 2010-2020, Bank Aceh Syariah 2016-2020, Bank NTB Syariah 2018-2020 (data diolah penulis)

Dapat diketahui dari grafik diatas bahwa pada tahun 2011 NPF berada dititik terendah yaitu sebesar 1,36% dan pada tahun 2013 mulai mengalami peningkatan terus menerus sampai tahun 2017. Bahkan pada tahun 2017 NPF mencapai titik tertinggi yaitu sebesar 11,71% dimana besarnya NPF tersebut berada diatas 5% yang merupakan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut Mahmoedin (2010: 51), aspek internal dan aspek eksternal merupakan aspek-aspek yang menjadi penyebab terjadinya suatu pembiayaan bermasalah. Baik itu dari pihak bank, nasabah, dan pihak diluar bank dan nasabah merupakan tiga unsur yang terdapat dalam aspek internal dan eksternal penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Adapun aspek yang berasal dari internal bank adalah rasio kecukupan modal, rasio likuiditas dan rasio rentabilitas. Sedangkan aspek eksternalnya yaitu faktor makro ekonomi yang diwakili Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah salah satu parameter kesehatan permodalan bank berupa rasio kecukupan modal. Perlunya permodalan bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yaitu mempersiapkan modal minimum lebih besar dari ketentuan yaitu 8% untuk mengantisipasi potensi kerugian. Tingginya nilai CAR mengindikasikan bahwa modal mampu menanggung potensi kerugian yang mungkin terjadi, salah satunya yaitu risiko pembiayaan.

Kemudian ada Financing to Deposit Ratio (FDR) yang merupakan aspek lain yang dapat mempengaruhi risiko pembiayaan yang mewakili aspek likuiditas. FDR adalah rasio pembiayaan terhadap DPK yang mencerminkan penyaluran dana. Semakin tinggi penyaluran dana maka memungkinkan pembiayaan bermasalah meningkat dikarenakan adanya kemungkinan risiko dana tidak kembali atau gagal bayar.

Adapun aspek lain yang mempengaruhi risiko pembiayaan yaitu Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang mewakili faktor rentabilitas. Tingginya risiko pembiayaan yang tercermin dalam NPF mengakibatkan bank melakukan pencadangan pembiayaan sehingga BOPO mengalami kenaikan. Maka dari itu, BOPO berpengaruh positif terhadap NPF.

Lalu terdapat faktor eksternal diluar bank berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB mampu menunjukkan bagaimana perkembangan perekonomian di daerah tertentu. PDRB suatu daerah yang semakin tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut dalam kondisi perekonomian

yang baik, sehingga masyarakat yang merupakan seorang nasabah mampu untuk memenuhi kewajibannya kepada bank yang menyebabkan pembiayaan bermasalah menjadi berkurang.

Tabel. 1 Posisi CAR, FDR, BOPO dan PDRB BUS BUMD pada Akhir Tahun

Tahun	CAR	FDR	BOPO	PDRB (Milyar)	NPF
2010	31,43%	121,31%	90,33%	Rp 751.111,51	1,80%
2011	30,29%	79,61%	84,07%	Rp 850.673,79	1,36%
2012	21,73%	87,99%	90,62%	Rp 945.301,08	3,97%
2013	17,99%	97,40%	85,76%	Rp 1.061.233,97	1,86%
2014	15,78%	84,02%	91,01%	Rp 1.192.293,85	5,84%
2015	22,53%	104,75%	98,78%	Rp 1.331.121,34	6,93%
2016	19,50%	91,66%	102,91%	Rp 1.116.763,55	9,65%
2017	18,88%	80,24%	106,32%	Rp 1.215.718,96	11,71%
2018	23,84%	86,92%	86,87%	Rp 1.091.308,52	2,42%
2019	23,11%	81,35%	82,57%	Rp 1.185.566,81	2,06%
2020	24,78%	81,33%	86,10%	Rp 1.157.351,27	2,69%

Sumber: Laporan Keuangan Bank BJB Syariah 2010-2020, Bank Aceh Syariah 2016-2020, Bank NTB Syariah 2018-2020 (data diolah penulis)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pergerakan CAR dan NPF mempunyai hubungan yang positif. Dimana pada tahun 2011 ketika CAR mengalami penurunan dari 31,43% menjadi 30,29%, NPF pun turun yang asalnya sebesar 1,80% menjadi 1,36%, begitupun tahun 2013 dan 2019. Sebaliknya pada tahun 2015, dimana CAR mengalami kenaikan dari 15,78% menjadi 22,53%, NPF pun mengalami kenaikan dari 5,84% menjadi 6,93%, begitupun pada tahun 2020. Yang mana hal tersebut tidak sejalan dengan konsep yang mengemukakan CAR mempunyai arah pengaruh negatif terhadap NPF. Pada tahun 2013 dapat dilihat bahwa FDR naik dari 87,99% menjadi 97,40%, justru NPF turun dari 3,97% menjadi 1,86%, begitupun pada tahun 2018. Sebaliknya pada tahun 2014 FDR mengalami penurunan dari 97,40% menjadi 84,02% justru NPF naik dari 1,86% menjadi 5,84%, begitupun pada tahun 2016, 2017 dan 2020. Yang mana hal tersebut bertentangan dengan konsep yang mengemukakan FDR mempunyai arah pengaruh yang positif terhadap NPF. Bank Indonesia menentukan bahwa rasio BOPO tidak lebih dari 90%, namun pada tabel diatas rasio BOPO rata-rata melebihi 90%. Bahkan pada tahun 2017 rasio BOPO mencapai 106,32%. Lalu dilihat pada tahun 2012, 2014, 2015 dan 2017 terjadi kenaikan pada PDRB namun NPF juga malah mengalami kenaikan. Sebaliknya saat PDRB mengalami penurunan pada tahun 2018, NPF pun mengalami hal yang sama. Yang mana hal tersebut tidak sejalan dengan konsep yang mengemukakan bahwa PDRB mempunyai arah pengaruh yang negatif terhadap NPF.

Dari teori yang ditulis Mahmoedin mengenai faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dengan fakta di atas yaitu CAR dan PDRB memiliki arah pengaruh yang positif terhadap NPF, juga FDR mempunyai arah pengaruh yang negatif terhadap NPF, dapat diambil kesimpulan bahwa setiap teori yang ada tidak sejalan dengan kejadian yang secara empiris. Kemudian hal tersebut diperkuat dengan perbedaan yang terdapat di penelitian-penelitian sebelumnya. Seperti pada penelitian Putranta dan Ambarwati (2019) yang mengatakan bahwa CAR mempunyai arah pengaruh negatif juga signifikan terhadap NPF kemudian mengemukakan juga tentang FDR yang memiliki arah pengaruh negatif juga tidak signifikan terhadap NPF. Akan tetapi pada penelitian Ferawati (2016) mengatakan arah pengaruh yang dimiliki FDR terhadap NPF adalah positif dan pada penelitian Maidalena (2013) menemukan CAR mempunyai pengaruh yang positif juga signifikan terhadap NPF. Lalu Kusmayadi, dkk (2017) dalam penelitiannya menyatakan PDB memiliki arah pengaruh negatif juga signifikan terhadap NPF namun dalam penelitian Nugrohowati dan Bimo (2019) menyatakan PDRB mempunyai arah pengaruh positif juga signifikan terhadap NPF.

Dari penjelasan diatas mengenai teori gap, serta hasil penelitian yang bervariasi membuat penulis tertarik guna melakukan penelitian mengenai NPF pada BUS BUMD di Indonesia menggunakan variabel yang diperkirakan sebagai aspek-aspek yang mempengaruhi.

## 2. Tinjauan Pustaka

Menurut Ismail (2010: 124), pembiayaan yang disalurkan bank namun nasabah gagal dalam melaksanakan pembayaran ataupun melaksanakan angsuran yang tidak sejalan dengan perjanjian yang sudah disepakati bank dan nasabah disebut dengan pembiayaan bermasalah.

Adapun penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah menurut Kasmir (2015: 148) yaitu:

### 1. Pihak Bank

Yaitu kurang teliti dalam melakukan analisisnya, sehingga tidak terprediksinya apa yang semestinya terjadi dan adanya kemungkinan melakukan salah perhitungan.

### 2. Pihak Nasabah

Terdapat dua unsur yaitu:

#### a. Faktor Kesengajaan

Yaitu dimana nasabah dengan sengaja tidak membayar kewajiban yang dimiliki terhadap bank sehingga terjadi pembiayaan bermasalah. Dimana seharusnya nasabah sebenarnya mampu membayar namun tidak memiliki kemauan untuk melunasi kewajibannya.

#### b. Faktor Tidak Sengaja

Yaitu dimana nasabah hendak membayar kewajibannya kepada bank namun tidak mampu untuk membayarnya. Contohnya yaitu pembiayaan yang dibiayai menghadapi suatu musibah seperti kebakaran atau banjir yang membuat nasabah tidak mampu untuk mengembalikan kewajibannya.

Setelah mengetahui penyebab risiko pembiayaan, kita dapat menghitung risiko tersebut dengan Non Performing Financing (NPF). Parameter yang memperlihatkan suatu risiko pembiayaan di perbankan syariah yang mencerminkan pembiayaan bermasalah yaitu NPF. Menurut Kasmir (2014: 227), NPF yang semakin besar menandakan pengelolaan bank tersebut tidak profesional, juga mengindikasikan tingginya NPF sejalan dengan tingkat risiko atas pembiayaan yang diberikan oleh bank yang dikatakan cukup tinggi, sehingga masyarakat lebih mempercayai bank yang memiliki nilai NPF yang rendah dibandingkan yang memiliki nilai NPF yang tinggi dikarenakan dapat menandakan risiko yang lebih kecil terhadap pembiayaan bermasalah pada suatu bank.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah salah satu indikator kesehatan bank yang menghitung kecukupan modal bank dalam menunjang aktiva yang menyimpan risiko. Menurut Hasibuan (2005: 58), CAR merupakan modal minimum bank yang dibutuhkan dan diukur berdasarkan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

CAR menggambarkan seberapa jauh semua aktiva yang ada di bank dan berisi risiko misalnya seperti kredit, penyertaan, dan lain sebagainya dimana hal tersebut dibiayai oleh modal bank disamping mendapatkan dana masyarakat yang merupakan dana dari pihak luar (Dendawijaya, 2005: 121). Sehingga CAR yang semakin tinggi menandakan bank dapat membiayai kebutuhan operasionalnya dan mengganggu risiko-risiko yang ditimbulkan seperti risiko pembiayaan.

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah satu dari sekian aspek likuiditas. FDR menggambarkan perbandingan pembiayaan yang diberikan bank dengan Dana Pihak Ketiga (DPK). Rasio tersebut dipakai guna mengukur seberapa banyak pinjaman yang diberikan bersumber dari DPK. Bank Indonesia memastikan bahwa 110% merupakan nilai maksimal besarnya FDR, yang berarti bank dapat membagikan pembiayaan lebih dari jumlah DPK yang dikumpulkan asal tidak lebih dari 110% (Rivai serta Arifin, 2010: 784- 785). Tetapi sebagian praktisi bank syariah menyepakati kalau batasan nyaman buat FDR yakni 80% dengan batasan toleransi 85%- 100%.

Hal tersebut sesuai dengan Muhammad (2005: 55) yang melaporkan rendah tingginya FDR memperlihatkan tingkatan likuiditas bank tersebut. Sehingga FDR semakin besar menggambarkan bank yang kurang likuid. Bank yang relatif tidak likuid ditunjukkan oleh FDR yang tinggi dan berarti bahwa bank meminjamkan semua dananya, sebaliknya kapasitas dana yang berlebih dan bisa disalurkan menunjukkan FDR yang rendah.

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yakni satu dari sekian aspek rentabilitas. BOPO dipakai untuk mengukur seberapa sanggup manajemen bank dalam mengatur biaya operasional terhadap pendapatan operasional (Hariyani, 2010: 54). Kemudian telah ditentukan bahwa 90% merupakan nilai maksimal BOPO yang mana terdapat dalam surat edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004. Hal tersebut dikarenakan apabila nilai BOPO lebih dari 90% atau mencapai 100% maka kegiatan operasional dalam bank tersebut dikelompokkan menjadi bank yang tidak efisien.

Biaya operasional yang semakin kecil membuat bank menjadi lebih baik karena menandakan bahwa pendapatan yang didapat lebih besar daripada biaya yang keluar (Rivai dan Arifin, 2010: 866). Jadi BOPO yang semakin rendah menunjukkan keluarnya biaya operasional yang efisien dan menyebabkan tingginya pendapatan yang diperoleh juga mampu meminimalkan kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yakni satu dari sekian faktor makro ekonomi. PDRB adalah salah satu parameter utama guna melihat bagaimana kondisi perekonomian di wilayah pada kurun waktu tertentu (Badan Pusat Statistik, 2017: 3). Terdapat dua jenis PDRB yaitu PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku.

### 3. Metode

Penelitian ini memakai metode kuantitatif deskriptif. Sampel diambil memakai metode purposive sampling dengan syarat yang ditetapkan yaitu merupakan Bank Umum Syariah yang tercatat di OJK hingga tahun 2020, merupakan BUS BUMD sampai tahun 2020 dan terakhir menyajikan laporan keuangan lengkap sesuai yang diperlukan dengan minimal periode 2 tahun dan terpilih tiga bank yang akan digunakan yaitu Bank BJB Syariah, Bank Aceh Syariah dan Bank NTB Syariah. Kemudian datanya berupa data sekunder yang berasal dari laporan keuangan masing-masing bank yang didalamnya terdapat laporan rasio keuangan dan PDRB berdasarkan domisili ketiga bank dan diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah dipublikasi lalu dikumpulkan menggunakan

teknik dokumentasi ataupun kutipan langsung. Kemudian penelitian ini memakai analisis jalur dengan menggunakan alat uji data berupa aplikasi pengolah data statistik.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Uji kelayakan atau dapat disebut dengan uji Goodness of Fit Model diperlukan guna menghitung ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual. Didapatlah hasil uji kelayakan sebagai berikut:

```

Model fit and quality indices
-----
Average path coefficient (APC)=0.292, P=0.036
Average R-squared (ARS)=0.772, P<0.001
Average adjusted R-squared (AARS)=0.707, P<0.001
Average block VIF (AVIF)=2.605, acceptable if <= 5, ideally <= 3.3
Average full collinearity VIF (AFVIF)=25.490, acceptable if <= 5, ideally <= 3.3
Tenenhaus GoF (GoF)=0.879, small >= 0.1, medium >= 0.25, large >= 0.36
Simpson's paradox ratio (SPR)=0.500, acceptable if >= 0.7, ideally = 1
R-squared contribution ratio (RSCR)=0.859, acceptable if >= 0.9, ideally = 1
Statistical suppression ratio (SSR)=1.000, acceptable if >= 0.7
Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)=0.875, acceptable if >= 0.7

```

Gambar 2. Hasil Pengujian Goodness of Fit

Sumber: Hasil Pengolahan Data Melalui Aplikasi Pengolah Data Statistik, 2021

Berikut ini merupakan tabel yang dibuat guna mengetahui mana sajakah indikator uji kelayakan yang diterima:

Tabel. 2 Hasil Indikator Goodness of Fit

No	Model Fit and Quality Indices	Fit Criteria	Hasil Analisis	Keterangan
1	Average Path Coefficient (APC)	p-value <0.05	0.292 P=0.036	diterima
2	Average R-square (ARS)	p-value <0.05	0.772 P<0.001	diterima
3	Average adjusted R-square (AARS)	p-value <0.05	0.707 P<0.001	diterima
4	Average block VIF (AVIF)	acceptable if <= 5, ideally <= 3.3	2.605	diterima
5	Average full collinearity VIF (AFVIF)	acceptable if <= 5, ideally <= 3.3	25.490	ditolak
6	Tanenhaus GoF (GoF)	small >= 0.1, medium >= 0.25, large >= 0.36	0.879	large
7	Simpson's paradox ratio (SPR)	acceptable if >= 0.7, ideally = 1	0.500	ditolak
8	R-squared contribution ratio (RSCR)	acceptable if >= 0.9, ideally = 1	0.859	ditolak
9	Statistical suppression ratio (SSR)	acceptable if >= 0.7	1.000	diterima
10	Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)	acceptable if >= 0.7	0.875	diterima

Sumber: Gambar 2. Diolah Kembali



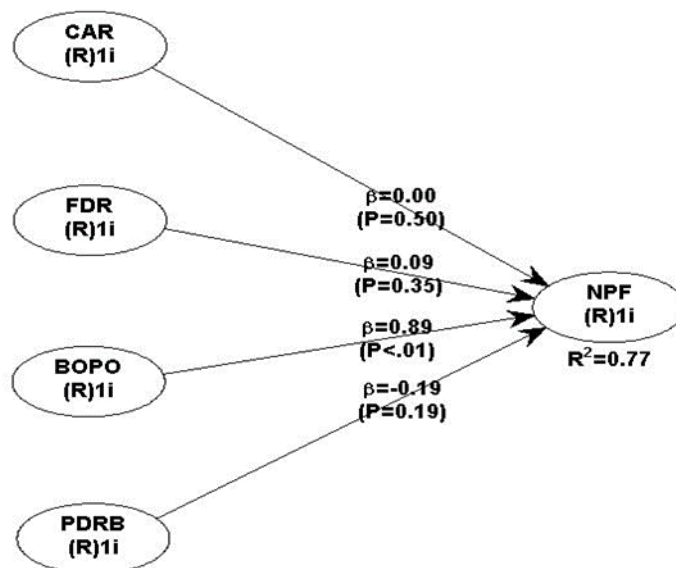
Tabel diatas menunjukkan bahwa Average Path Coefficcient (APC) mempunyai nilai 0,292 dan p-value sebesar 0,036 dan memenuhi kriteria model karena kriteria diterimanya yaitu nilai p-value nya kurang dari  $\alpha=0,05$ . Kemudian Average R-square (ARS) bernilai 0,772 dan p-value sebesar  $<0,001$  berarti ARS diterima karena sesuai dengan kriteria dimana diterima apabila p-value nya kurang dari  $\alpha=0,05$ . Lalu Average adjusted R-square (AARS) benilai 0,707 dan p-value sebesar  $<0,001$  pun diterima karena memenuhi kriteria dimana diterima apabila p-value nya memiliki nilai kurang dari  $\alpha=0,05$ .

Kemudian untuk Average block VIF (AVIF) mempunyai nilai 2,605 dan dikatakan diterima karena kriterianya yaitu diterima apabila nilainya kurang dari =5 dan dikatakan ideal bila kurang dari =3,3. Sedangkan nilai Average full collinearity VIF (AFVIF) yaitu 25,490 dan dikatakan ditolak karena tidak memuhi kriteria dimana diterima apabila nilainya kurang dari =5 dan dikatakan ideal bila kurang dari =3,3.

Lalu Tanenhaus GoF (GoF) dikatakan diterima karena nilainya 0,879 dimana sesuai kriteria minimal memiliki nilai 0,01 dan diketahui tergolong kategori besar karena nilainya nilainya lebih dari =0,36. Kemudian Sympson's paradox ratio (SPR) yang memiliki nilai sebesar 0,500 dikatakan ditolak karena tidak memenuhi kriteria dimana diterima apabila lebih dari =0,7 dan dikatakan ideal apabila nilainya 1. Untuk R-squared contribution ratio (RSCR) dinyatakan ditolak dengan nilai 0,859 karena tidak sesuai kriteria dimana diterima apabila lebih dari =0,09 dan dikatakan ideal apabila bernilai 1. Sedangkan dua sisanya yaitu Statistical suppression ratio (SSR) yang bernilai 1,000 dan Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR) yang bernilai 0,875 dikatakan diterima karena keduanya memenuhi kriteria dimana diterima apabila lebih dari =0,7.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuh dari sepuluh idikator goodness of fit diterima yang berarti model penelitian bisa digunakan karena kriteria goodness of fit tidak bersifat mutlak. Setelah melakukan uji goodness of fit dan model dinyatakan dapat digunakan maka proses selanjutnya yaitu melakukan analisis jalur.

Analisis ini memiliki tujuan untuk menggambarkan model teoritis yang telah dibangun dan mampu melihat bagaimana item pengukuran terkait dengan CAR, FDR, BOPO dan PDRB berpengaruh terhadap NPF. Berikut analisis jalur yang telah dilakukan:



Gambar 3. Hasil Analisis Jalur Secara Parsial

Sumber: Hasil Olah Data Melalui Aplikasi Pengolah Data Statistik, 2021

Hasil pengujian analisis jalur diatas memperlihatkan bagaimana pengaruh CAR, FDR, BOPO dan PDRB secara parsial terhadap NPF. Didapatkan hasil dibawah ini:

1. Pengaruh CAR berbanding lurus terhadap NPF yang berarti jika CAR mengalami kenaikan maka NPF akan naik. Kemudian CAR yang berpengaruh tidak signifikan terhadap NPF, dengan koefisien jalur yang mempunyai nilai 0,00 dan p-value 0,50, dapat diartikan bahwa tingginya kecukupan modal tidak berpengaruh terhadap naiknya pembiayaan bermasalah karena faktor-faktor yang paling mempengaruhi bukanlah CAR.
2. Pengaruh FDR berbanding lurus terhadap NPF yang dapat diartikan jika FDR mengalami kenaikan maka NPF akan naik. Kemudian FDR mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap NPF, dengan koefisien jalur yang mempunyai nilai 0,09 dan p-value 0,35, bisa diartikan bahwa banyaknya penyaluran tidak memiliki pengaruh terhadap naiknya pembiayaan bermasalah dikarenakan FDR bukanlah yang faktor dominan karena FDR merupakan perbandingan penghimpunan dan penyaluran dana.
3. Pengaruh BOPO berbanding lurus terhadap NPF yang bisa diartikan jika BOPO naik maka NPF juga akan mengalami kenaikan. Kemudian BOPO berpengaruh signifikan terhadap NPF, dengan koefisien jalur yang mempunyai nilai 0,89 dan p-value <0,01, bisa diartikan bahwa naiknya rasio BOPO berpengaruh besar terhadap naiknya pembiayaan bermasalah karena BOPO merupakan salah satu faktor yang paling mempengaruhi.

4. Pengaruh PDRB berbanding terbalik terhadap NPF yang dapat diartikan bahwa jika PDRB mengalami kenaikan maka NPF akan menurun. Kemudian PDRB mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap NPF, dengan koefisien jalur yang mempunyai nilai -0,19 dan p-value 0,19, bisa diartikan PDRB tidak memiliki pengaruh terhadap menurunnya pembiayaan bermasalah karena dengan perekonomian yang membaik yang mencerminkan pendapatan meningkat belum tentu membuat masyarakat membayar kewajibannya dan justru lebih memilih untuk membeli kebutuhannya

Nilai R-square dipakai untuk memperlihatkan variasi variabel CAR, FDR, BOPO dan PDRB menjelaskan variabel NPF yaitu dengan nilai 0,77 yang berarti bahwa sebanyak 77% variabel NPF dijelaskan oleh variasi variabel CAR, FDR, BOPO dan PDRB. Kemudian 23% lainnya dijelaskan oleh variasi variabel lain yang mana tidak diteliti di penelitian ini.

Setelah menyelesaikan analisis jalur dan koefisien determinasi maka proses selanjutnya yaitu dengan membuat persamaan penelitian.

Berikut merupakan hasil persamaan CAR, FDR, BOPO dan PDRB terhadap NPF:

$$NPF = 0,00CAR + 0,09FDR + 0,89BOPO - 0,19PDRB + \varepsilon$$

Setelah mendapatkan hasil persamaan proses selanjutnya yaitu melakukan pengujian hipotesis.

a. Hipotesis 1

Dilihat dari analisis jalur sebelumnya dikatakan bahwa CAR memiliki koefisien jalur yang bernilai 0,00 dengan p-value 0,50 dan memiliki nilai lebih besar dari  $\alpha=0,05$  maka dikatakan  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak karena bertentangan dengan kriteria diterima yaitu p-value bernilai kurang dari  $\alpha=0,05$  atau dapat dikemukakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari CAR terhadap NPF pada BUS BUMD di Indonesia.

b. Hipotesis 2

Dilihat dari analisis jalur sebelumnya dikatakan bahwa FDR memiliki koefisien jalur yang bernilai 0,09 dengan p-value 0,35 dan memiliki nilai lebih besar dari  $\alpha=0,05$  maka dikatakan  $H_0$  diterima dan  $H_2$  ditolak karena bertentangan dengan kriteria diterima yaitu p-value bernilai kurang dari  $\alpha=0,05$  atau dapat dikemukakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari FDR terhadap NPF pada BUS BUMD di Indonesia.

c. Hipotesis 3

Dilihat dari analisis jalur sebelumnya dikatakan bahwa BOPO memiliki koefisien jalur yang bernilai 0,89 dengan p-value  $<0,01$  dan memiliki nilai lebih kecil dari  $\alpha=0,05$  maka dikatakan  $H_3$  diterima dan  $H_0$  ditolak karena sesuai dengan kriteria diterima yaitu p-value bernilai

kurang dari  $\alpha=0,05$  atau bisa dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari BOPO terhadap NPF pada BUS BUMD di Indonesia.

d. Hipotesis 4

Dilihat dari analisis jalur sebelumnya dikatakan bahwa PDRB memiliki koefisien jalur yang bernilai -0,19 dengan p-value 0,19 dan memiliki nilai lebih besar dari  $\alpha=0,05$  maka dikatakan  $H_0$  diterima dan  $H_4$  ditolak karena bertentangan dengan kriteria diterima yaitu p-value bernilai kurang dari  $\alpha=0,05$  atau bisa dikemukakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari PDRB terhadap NPF pada BUS BUMD di Indonesia.

Berdasarkan empat hipotesis diatas hanya satu hipotesis yang diterima adalah hipotesis 3 yaitu terdapat pengaruh yang signifikan dari BOPO terhadap NPF pada BUS BUMD di Indonesia.

Berdasarkan pengujian hipotesis sebelumnya, bisa dinyatakan CAR memiliki arah pengaruh positif juga tidak signifikan terhadap NPF yang berarti tingginya kecukupan modal tidak mempunyai pengaruh terhadap naiknya pembiayaan bermasalah. Hal ini diduga terjadi dikarenakan tingginya CAR membuat kemampuan bank berkurang untuk melakukan ekspansi contohnya yaitu pembiayaan yang disalurkan dikarenakan dalam menutupi risiko kerugiannya menggunakan cadangan modal yang semakin besar. Dimana hasil ini sesuai dengan penelitian Haifa dan Wibowo (2015) yang mengemukakan CAR tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap NPF.

CAR mempunyai arah pengaruh positif juga tidak signifikan terhadap NPF pada BUS BUMD di Indonesia menandakan CAR tidak mempunyai pengaruh terhadap NPF. Akan tetapi ini bukan berarti BUS BUMD dapat mengabaikan CAR dikarenakan kecukupan modal pun sewaktu-waktu dapat terganggu karena pembiayaan yang berlebihan. Sehingga bank pada saat itu mempertahankan untuk tidak menyalurkan pembiayaan dan menambah aset yang berisiko sehingga mewajibkan bank untuk menambah modalnya karena harus memenuhi ketentuan CAR.

Berdasarkan pengujian hipotesis sebelumnya, bisa dinyatakan FDR mempunyai arah pengaruh positif juga tidak signifikan terhadap NPF yang berarti bahwa banyaknya penyaluran tidak mempunyai pengaruh terhadap naiknya pembiayaan bermasalah. Hal tersebut disebabkan dalam pemberian pembiayaannya bank telah melakukan menggunakan mekanisme prinsip kehati-hatian guna mengurangi peluang terjadinya risiko pembiayaan bermasalah saja. Kemudian saat di awal memberikan pembiayaan bank dan nasabah melakukan perjanjian yang membuat nasabah beritikad baik untuk membayar kewajibannya sehingga mengurangi faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah. Dimana hasil ini didukung oleh penelitian Asnaini (2014) yang mengemukakan FDR tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap NPF.

FDR memiliki arah pengaruh positif juga tidak signifikan terhadap NPF pada BUS BUMD di Indonesia menandakan FDR tidak memiliki pengaruh terhadap NPF. Akan tetapi bukan berarti BUS BUMD dapat mengabaikan NPF dikarenakan bisa saja saat terjadi kenaikan FDR yang mencerminkan besarnya rasio pembiayaan disalurkan terhadap DPK maka bank menjadi relatif tidak likuid dan memungkinkan pembiayaan bermasalah meningkat karena adanya kemungkinan risiko dana tidak kembali. Maka dari itu bank harus menjaga prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaannya dengan prinsip 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition.

Berdasarkan pengujian hipotesis sebelumnya, bisa dinyatakan BOPO mempunyai arah pengaruh positif juga signifikan terhadap NPF yang berarti naiknya rasio BOPO berpengaruh besar terhadap naiknya pembiayaan bermasalah. Rasio BOPO memperlihatkan seberapa efisien bank dalam melakukan usahanya. Bank dinyatakan efisien bila mampu mencapai output yang optimal dengan input tertentu, sehingga untuk mencapai pendapatan maksimum bank dapat menekan beban operasionalnya. Oleh karena itu, rasio BOPO yang menurun memperlihatkan tingkat pengelolaan bank yang semakin baik. Pengelolaan biaya operasional yang baik bisa menghasilkan keuntungan yang tinggi. Kenaikan keuntungan tersebut menggambarkan meningkatnya kualitas pembiayaan karena pendapatan tersebut didapat dari penempatan dana dalam bentuk pembiayaan yang merupakan pendapatan bagi hasil sehingga hal itu juga menyebabkan penurunan pembiayaan bermasalah. Penelitian ini pun sejalan dengan Rika (2016) yang mengemukakan BOPO memiliki arah pengaruh positif juga signifikan terhadap NPF.

BOPO yang mempunyai arah pengaruh positif juga signifikan terhadap NPF pada BUS BUMD di Indonesia berarti BOPO memiliki pengaruh paling besar terhadap NPF. BOPO yang rendah dapat berdampak pada penurunan pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu BUS BUMD harus memperhatikan rasio BOPO tetap stabil dengan cara menekan biaya operasional misalnya penggunaan bahan cetak dan tinta. Dengan demikian bank dapat menghasilkan pendapatan yang maksimal dimana pendapatan tersebut mencerminkan kualitas pembiayaan yang meningkat karena pendapatan tersebut adalah pendapatan bagi hasil yang didapat dari penempatan dana berbentuk pembiayaan sehingga menyebabkan penurunan pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan, bisa dinyatakan PDRB mempunyai arah pengaruh negatif juga tidak signifikan terhadap NPF yang bisa diartikan naiknya PDRB tidak mempunyai pengaruh terhadap menurunnya pembiayaan bermasalah dikarenakan naiknya pendapatan belum tentu membuat masyarakat membayar kembali kewajibannya. Hal ini disebabkan naiknya

pendapatan membuat masyarakat membeli kebutuhannya karena kebutuhan masyarakat yang cenderung meningkat. Dimana penelitian ini sejalan dengan Akbar (2016) yang mengemukakan GDP memiliki arah pengaruh negatif terhadap NPF.

PDRB memiliki arah pengaruh negatif juga tidak signifikan terhadap NPF pada BUS BUMD di Indonesia menandakan PDRB tidak berpengaruh terhadap NPF. Akan tetapi bukan berarti BUS BUMD dapat mengabaikan PDRB dikarenakan bisa saja saat terjadi kenaikan PDRB yang mencerminkan peningkatan pendapatan malah membuat nasabah mampu membayar kewajibannya sehingga bank dapat melakukan ekspansi penyaluran pembiayaan.

## 5. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil pengujian yang telah dilaksanakan yaitu CAR dan FDR secara parsial memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap NPF pada BUS BUMD di Indonesia tahun 2010-2020 yang menunjukkan bahwa peningkatan CAR ataupun FDR tidak mempengaruhi peningkatan NPF. Kemudian PDRB yang memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap NPF pada BUS BUMD di Indonesia tahun 2010-2020 yang menunjukkan bahwa peningkatan FDR tidak mempengaruhi penurunan NPF. Dan terakhir yaitu BOPO mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap NPF pada BUS BUMD di Indonesia tahun 2010-2020 yang menunjukkan bahwa peningkatan BOPO mempengaruhi peningkatan NPF.

Lalu terdapat saran yang bisa diberikan oleh penulis yaitu manajer perbankan syariah perlu memberikan perhatian lebih terhadap tingginya rasio BOPO. Hal tersebut dikarenakan informasi yang dihasilkan pada penelitian ini dimana mengemukakan BOPO mempunyai pengaruh signifikan terhadap NPF sehingga sebaiknya manajemen perbankan syariah bisa membuat suatu strategi guna menjaga tingkat NPF agar berada di posisi sehat dengan cara penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan tingkat rasio BOPO.

Kemudian untuk penetian selanjutnya disarankan agar waktu pengamatan atau rentang waktu penelitiannya seragam serta memperbanyak variabel independen yang akan digunakan baik itu dari aspek internal maupun aspek eksternal yang diduga memberikan pengaruh terhadap pembiayaan bermasalah di perbankan syariah. Juga menggunakan waktu penelitian terbaru yang diharapkan guna mendapat hasil yang lebih akurat.

## Daftar Pustaka

Akbar, Dinnul Alfian. (2016). INFLASI, GROSS DOMESCTIC PRODUCT (GDP), CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR), DAN FINANCE TO DEPOSIT RATIO (FDR) TERHADAP NON PERFORMING

- FINANCING (NPF) PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal I-Economic*, 2(2), 19-37.
- Asnaini, Sri Wahyuni. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal TEKUN*, V(2), 264-280.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2017). Produk Domestik Regional Bruto Jawa Barat Menurut Pengeluaran Tahun 2012-2016. Bandung: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
- Dendawijaya, Lukman. (2005). Manajemen Perbankan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ferawati, D. (2016). Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2012-2015 (Thesis). Didapat dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/>
- Haifa dan Wibowo, Dedi. (2015). Pengaruh Faktor Internal Bank dan Makro Ekonomi Terhadap Non Performing Financing (NPF) Perbankan Syariah di Indonesia: Periode 2010-2014. *Jurnal Nisbah*, 3(1), 74-87.
- Hariyani, Iswi. (2010). Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet. Jakarta: PT. Gramedia.
- Hasibuan, Malayu SP. (2005). Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ismail. (2010). Manajemen Perbankan. Jakarta: Prendamedia Group.
- Kasmir. (2014). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2015). Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kusmayadi, dkk. (2017). THE IMPACT OF MACROECONOMIC ON NONPERFORMING LOAN: COMPARISON STUDY AT CONVENTIONAL AND ISLAMIC BANKING. *Iqtishadia : Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 10(2), 59-82.
- Mahmoedin, A. (2010). Melacak Kredit Bermasalah. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Maidalena, M. (2014). Analisis Faktor Non Performing Financing (NPF) Pada Industri Perbankan Syariah. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1(1), 127-138.
- Muhammad. (2005). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Nugrohowati, R.N.I dan Bimo, S. (2019). Analisis Pengaruh Faktor Internal Bank dan Eksternal terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 5(1), 42-49.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Putranta, E.A.H dan Ambarwati, L. (2019). PENGARUH FAKTOR-FAKTOR INTERNAL PERBANKAN TERHADAP NON PERFORMING FINANCING PADA BANK UMUM SYARIAH. *Jurnal Riset Manajemen* 6(2), 115-130.
- Rika, R. (2016). Dampak Inflasi, BI Rate, Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 2(1), 1-9.
- Rivai, Veithzal dan Arifin, Arviyan. (2010). Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi. Jakarta: PT. Bumi Akasara.